

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Freeman, M.D.A., Lloyd's *Introduction to Jurisprudence*, London: Thomson Reuters, 2008.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gunanegara, *Rakyat Dan Negara: Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu, Dan Yuridprudensi)*, Jakarta: Tatanusa, 2008.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), XXII, Kejaksaan Agung R.I. 2.
- J.H., Burns and H.L.A. Hart., *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*, London: The Collected Works of Jeremy Bentham, The Athlone Press, 1977
- Marpaung, Ladeng, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Prakoso, Djoko, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Rawls, John, *A Theory Of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Saleh, K. Wantjik, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2005.
- Sumardjono, Maria S.W., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Syah, Mudakir Iskandar, *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Dilengkapi Dengan Peraturan*

Perundang-Undangan & Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Jakarta: Jala Permata, 2007.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,

Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara

3. Jurnal/Skripsi/Tesis

Bilatul, Allya Salsa, "Modernisasi Melalui Pembangunan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Indonesia", *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3, 2024.

Enggartiasto, Deo "Problematika Dan Solusi Pada Pengadaan Tanah" *Jurnal, Tunas Agraria* 4, no. 1, 2021.

Faiz, Pan Mohamad, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, 6, no. 1, 2009.

Hutapean, Argatta Oliver Pratama dan Ojak Nainggolan, "Peranan Bidang DATUN Dalam Memberi Pendampingan Hukum Tentang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)", *Jurnal, HKBP Nommensen*, Jakarta, 2025.

Mulyadi, Mohammad, "Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara", *Jurnal*, Jakarta, 2017.

Padjo, Mr and M. Nazir Salim, "Memetakan Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bandara Komodo," *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2020.

Sudana, Ervan Hari, "Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", *Notary Law Journal*, 1, no. 1, 2022.

Suraji, "Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah Dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (Studi Kasus Di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung)", *Jurnal Media Birokrasi*, 4, no. 2, 2022.

Tinambunan, Wahyu Donri dan Galih Raka Siwi, "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan", *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2, 2022.

Irsady, Arif Rahman, "Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Peningkatan Kewajiban Pemberi Kerja Pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta Dengan Kejaksaan Negeri Bantul)", *Tesis*, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.

Yutama, Nur Hadi, “Pelibatan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Yogyakarta Dalam Meningkatkan Kepatuhan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, Jakarta, 2020.

Titahelu, Ronald Z, “Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat,” *Disertasi*, Program Pasca Sarjana Pada Universitas Airlangga, Tidak Dipublikasikan, 1993.